

Peran Kelas Menengah dalam Mewujudkan Kebijakan Pemekaran di Provinsi Papua Tahun 2022

Bagas Islam Mahendra¹, Tamrin Kiram²

^{1,2} Universitas Andalas

Email: bagasbaldguy5@gmail.com

ABSTRAK

Kelas menengah memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan pemekaran wilayah di Indonesia. Pemekaran wilayah melibatkan pembagian administratif satu wilayah menjadi dua atau lebih, dengan tujuan pengembangan masyarakat dan pembangunan yang merata. Keterlibatan kelas menengah dalam diskursus pemekaran wilayah, terutama di Indonesia, sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran kelas menengah dalam kebijakan pemekaran wilayah di Papua, dengan menggunakan teori mobilisasi sumber daya dan peluang politik. Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur, penelitian ini meneliti isu-isu strategis yang dirumuskan oleh kelas menengah dalam kebijakan pemekaran wilayah Papua dan mobilisasi sumber daya serta peluang politik mereka yang aktif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Kelas menengah dan mahasiswa Papua berperan penting dalam perumusan isu strategis kebijakan pemekaran. Keterlibatan kelas menengah dan mahasiswa memastikan kebijakan pemekaran lebih inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Organisasi mahasiswa memainkan peran sentral dalam mobilisasi dukungan terhadap kebijakan pemekaran. Faktor politik dan struktur negara juga memengaruhi keberhasilan gerakan sosial.

Kata Kunci : Kelas menengah, pemekaran, mobilisasi sumber daya, gerakan sosial

PENDAHULUAN

Sudah tidak dapat dinafikan lagi bahwa kelas menengah memiliki peran dan pengaruh yang besar terhadap kebijakan pemekaran daerah atau wilayah di Indonesia. Pemekaran wilayah adalah pembagian kewenangan administratif dari satu wilayah menjadi dua atau lebih wilayah baru. Secara ideal, cita-cita yang sering didengungkan dari pemekaran ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Dalam proses pemekaran suatu wilayah akan sangat erat kaitannya dengan eksistensi dan presensi dari kelompok atau kelas menengah. Proposisi yang dapat diambil oleh peneliti adalah kelas menengah cenderung akan terlibat dalam diskursus pemekaran wilayah, terutama jika studi kasusnya berada di Indonesia.

Dari beberapa studi yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti tidak ditemukan kesepakatan terkait dengan definisi dari kelas menengah itu sendiri. Namun, hal yang dapat diketahui dari kelas menengah ini adalah bahwa mereka mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, dengan begitu dapat dikatakan juga bahwa kelas menengah merupakan mereka yang terdidik. Adapun kelas menengah juga dapat dikatakan sebagai masyarakat in between bukan sebagai kelas penguasa dan bukan pula kelas masyarakat biasa. Kehadiran kelas menengah sendiri dapat mendorong atau menciptakan perubahan sosial maupun politik di suatu wilayah. Sejarah juga telah mengungkapkan hal tersebut melalui peristiwa revolusi perancis atau disebut juga sebagai revolusi industry yang mana gerakan ini dipelopori atau dimotori oleh mereka yang merupakan

kelompok atau kelas menengah. Di Indonesia sendiri, keberhasilan yang paling monumental dari gerakan yang dipelopori oleh kaum menengah ialah reformasi tahun 1998 yang mana mahasiswa menjadi sosok yang sentral dan menjadi pemeran utama dari peristiwa tersebut.

Dalam konteks peran kelas menengah terhadap kebijakan pemekaran wilayah di Indonesia, secara tekstual, pemekaran wilayah juga kerap menjadi pembahasan yang ramai dalam ranah akademik. Jika menelisik ke belakang, kita dapat mengetahui bahwasannya peran kelas menengah menjadi sangat penting. Misalnya, pemekaran Mentawai menjadi sebuah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dipelopori oleh Ikatan Pemuda Pelajar Mentawai (IPMEN) se-Sumatra Barat pada tahun 1980. Kemudian, ada tokoh-tokoh seperti Edison Saleleubaja dan Astarmizi yang juga menjadi Bupati dan Wakil Bupati pertama Kabupaten Kepulauan Mentawai serta Ketua DPRD pertama, San Andi Iklas Samaloisa. Kemudian, pemekaran Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2003 yang dimotori oleh gerakan Mahasiswa UNSA serta LSM. Selain itu terdapat tokoh sentral seperti Drs. H. M. Nur Yasin yang juga menjadi Ketua Komite Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat.

Beranjak ke tanah Papua, isu pemekaran di wilayah ini sudah menjadi konsumsi publik yang seksi. Bagaimana tidak, banyak media-media massa mengangkat pembahasan ini, beberapa diantaranya membahas mengenai pro dan kontra dari pemekaran di tanah Papua ini. Seluruh elemen atau level dalam struktur masyarakat bisa dibilang terlibat dalam diskusi publik mengenai isu pemekaran ini. Mulai dari elit lokal membicarakan isu pemekaran wilayah dengan perspektif kepentingan para elit. Pegawai

membicarakannya dengan perspektif keamanannya sebagai pegawai pemerintah. Lalu pedagang membicarakan kemungkinan pengembangan usaha mereka, buruh pun membicarakan dalam perspektif kemungkinan perbaikan hidup mereka. Walaupun begitu, tetap ada sebagian masyarakat yang menolak pemekaran ini dengan berbagai alasan, mulai dari adanya kekhawatiran akan ketersingkirian orang asli Papua, hingga korupsi ekonomi dan politik yang melibatkan para elit lokal Papua dan beberapa elemen masyarakat yang menjadi kolusinya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemekaran di tanah Papua masih banyak menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

Peran kelas menengah dalam pemekaran di wilayah Papua dapat terlihat dari keterlibatan berbagai organisasi mahasiswa Papua yang mendukung adanya pemekaran provinsi di Tanah Papua. Beberapa dari organisasi ini membicarakan pemekaran dalam perspektif membuka lapangan pekerjaan dan peluang untuk orang asli Papua serta memperpendek rentang kendali pemerintah karena masih banyak kawasan-kawasan yang selama ini sulit dijangkau baik segi kesejahteraan, pembangunan baik SDM maupun SDA. Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja peran kelas menengah dalam kebijakan pemekaran di provinsi Papua. Tulisan ini akan menggunakan pendekatan teori mobilisasi sumber daya yang peluang politik.

STUDI KEPUSTAKAAN

Middle Class

Masyarakat kelas menengah merujuk pada lapisan masyarakat yang memiliki tingkat kehidupan ekonomi yang lebih stabil dibandingkan dengan kelas bawah. Mereka

mampu memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier dengan lebih mudah karena tingkat ekonomi yang lebih mapan. Sebagai contoh, sebuah penelitian menyebutkan bahwa masyarakat kelas menengah memiliki tingkat ekonomi yang memungkinkan mereka untuk memiliki hobi.

Dari segi pendidikan, masyarakat kelas menengah cenderung memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan formal dan sumber daya pendidikan lainnya dibandingkan dengan kelas bawah. Mereka mungkin mampu membiayai pendidikan tinggi untuk anak-anak mereka dan seringkali nilainya diutamakan. Di sisi lain, kelas menengah atas mungkin memiliki akses yang lebih besar ke pendidikan internasional dan sumber daya pendidikan yang lebih eksklusif.

Dari segi ekonomi, perbedaan utama antara masyarakat kelas menengah dan kelas lainnya adalah kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Kelas bawah mungkin berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara kelas menengah atas mungkin memiliki akses yang lebih besar ke barang dan layanan mewah. Kelas menengah, di sisi lain, cenderung memiliki tingkat konsumsi yang lebih tinggi daripada kelas bawah, tetapi tidak sebesar kelas atas. Mereka mungkin mampu membeli barang-barang non-esensial dan menikmati gaya hidup yang lebih nyaman, tetapi mungkin tidak sebanyak kelas atas.

Masyarakat kelas menengah berdasarkan posisinya secara vertikal dalam stratifikasi sosial juga dapat dikatakan sebagai mereka yang tidak berkuasa atau bukan penguasaan tetapi juga bukan masyarakat biasa. Maka dari itu, definisi dari kelas menengah yang telah disinggung sedikit di bagian pendahuluan bahwa “..... masyarakat kelas menengah merupakan masyarakat in between, bukan sebagai kelas

penguasa dan bukan pula kelas masyarakat biasa” menjadi relevan.

Teori Mobilisasi Sumber Daya

Teori mobilisasi sumber daya menyiratkan bahwa ketidakpuasan dalam masyarakat dapat memicu timbulnya gerakan sosial. Dalam kerangka teoritis ini, faktor organisasi dan kepemimpinan dianggap sebagai pendorong atau penghambat keberhasilan suatu gerakan. Saat ini, teori Mobilisasi Sumber Daya mendominasi analisis gerakan sosial dan tindakan kolektif dalam disiplin ilmu Sosiologi. Teoretisi seperti McAdam, McCarthy, dan Zald termasuk dalam arus pemikiran ini, dengan McCarthy dan Mayer N Zald mengemukakan bahwa gerakan sosial bukan hanya reaksi spontan terhadap ketidakpuasan, melainkan tergantung pada sumber daya material seperti waktu, uang, struktur organisasi, dan keterampilan organisasi.

Teori mobilisasi sumber daya manusia merupakan bagian dari teori gerakan baru yang menandai keberagaman pelaku gerakan sosial. Gerakan ini tidak lagi berasal dari ketidakpuasan buruh dan petani, melainkan muncul dari golongan horizontal seperti mahasiswa, kalangan profesional, dan perempuan. Isu-isu seperti hak asasi manusia, demokratisasi, perempuan, lingkungan hidup, dan ketidakadilan menjadi fokus studi gerakan sosial yang tersebar di berbagai disiplin ilmu.

Teori Mobilisasi Sumber Daya menjelaskan dua aspek utama. Pertama, terkait sumber daya fisik, non-fisik, dan finansial yang dimiliki oleh gerakan, seperti jaringan, uang, pengetahuan, atau keahlian tertentu. Sumber daya ini dapat dikontrol baik secara individu maupun kolektif oleh kelompok. Kedua, mobilisasi adalah proses tak terpisahkan di mana para aktor berusaha

memanfaatkan sumber daya mereka untuk mencapai tujuan gerakan. Kedua aspek ini bekerja bersinergi dalam upaya mencapai tujuan gerakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, deskripsi dalam bentuk kata-kata, pada suatu konteks alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mengemukakan fakta serta menganalisis mengenai peran kelas menengah dalam pemekaran wilayah di Papua.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan metode pengumpulan data pustaka, mengumpulkan informasi, membaca, mencatat, dan mengolah data penelitian yang didapatkan dari buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sehingga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari beberapa artikel ilmiah, artikel berita, buku, dan jurnal yang membahas terkait peran kelas menengah dalam pemekaran di wilayah Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merumuskan isu strategis di dalam kebijakan pemekaran di Papua

Keterlibatan kelas menengah dalam merumuskan isu strategis terkait kebijakan pemekaran di wilayah Papua menjadi sebuah

hal yang krusial dalam proses pengambilan keputusan. Kelas menengah seringkali berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memiliki akses yang lebih luas untuk menggali informasi, serta memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Papua. Dalam merumuskan isu-isu strategis, kelas menengah dapat berperan sebagai perwakilan yang mampu menyuarakan berbagai aspirasi masyarakat. Mereka dapat mengidentifikasi masalah-masalah kritis yang dihadapi oleh masyarakat Papua, seperti ketidaksetaraan dalam pembangunan, ketidakmerataan pelayanan publik, serta isu-isu kesejahteraan dan martabat masyarakat.

Pentingnya pemahaman terkait masalah-masalah faktual dan aktual tersebut menjadi dasar bagi kelas menengah dalam merumuskan solusi yang konkret dan tepat sasaran. Dengan melibatkan pemangku kepentingan utama, seperti tokoh masyarakat, akademisi, dan kelompok aktivis, kelas menengah dapat memastikan bahwa isu-isu yang diangkat mencerminkan kebutuhan dan keinginan sebenarnya dari masyarakat Papua.

Keterlibatan mahasiswa Papua dalam mengadvokasi dan mengartikulasikan kebijakan pemekaran di wilayah tersebut menjadi bagian yang sangat penting dalam menyuarakan suara masyarakat. Mahasiswa seringkali menjadi agen perubahan yang berani menyuarakan aspirasi, memberikan analisis kritis, serta menjadi pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam mengadvokasi kebijakan pemekaran, mahasiswa Papua dapat menyuarakan prinsip-prinsip pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta upaya konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, mereka

juga dapat fokus pada upaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua, memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menghormati hak-hak dan identitas budaya masyarakat setempat.

Melalui partisipasi aktif kelas menengah dan mahasiswa Papua dalam merumuskan dan mengadvokasi kebijakan pemekaran, diharapkan dapat diciptakan kebijakan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Papua.

Memobilisasi Sumber Daya dan Peluang politik

Teori mobilisasi sumber daya merupakan teori dikenalkan oleh Anthony Oberschall, teori ini berpendapat bahwa gerakan sosial bisa muncul ketika ada ketidakpuasaan di tengah masyarakat. Ketidakpuasaan tersebut terlihat belum meratanya pembangunan baik itu dari aspek infrastruktur maupun dari aspek pembangunan kualitas SDM-nya. Isu pemekaran wilayah di tanah Papua dapat dipandang atau didekati dengan perspektif gerakan sosial, menurut Locher, suatu gerakan dapat diidentifikasi atau dikategorikan sebagai gerakan sosial ketika dia bersifat terorganisir, terdapat aspek pertimbangan, dan aspek daya tahan. Jika dilihat secara historis, pemekaran di Papua sudah terjadi tidak hanya sekali. Pemekaran di Papua pertama kali terjadi pada tahun 2001 dimana Provinsi Papua dimekarkan menjadi Papua Barat. Berlanjut di tahun 2022, Provinsi Papua kembali dimekarkan menjadi tiga provinsi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Terdapat proposisi dalam teori Mobilisasi Sumber Daya bahwa tujuan

daripada gerakan sosial hanya dapat tercapai apabila terdapat wadah berupa organisasi. Teori mobilisasi sumber daya melihat faktor keberhasilan suatu gerakan sosial dari kemampuan suatu organisasi memobilisasi sumber daya baik secara internal maupun eksternal baik secara materi maupun non-materi. Beberapa Organisasi yang mendukung pemekaran provinsi Papua yang notebene merupakan mahasiswa atau kelas menengah berdasarkan data yang diperoleh peneliti berhasil untuk memobilisasi partisan yang memang memiliki kesamaan tujuan. Mulai dari organisasi Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda peduli pembangunan di tanah Papua yang memobilisasi partisan untuk melakukan aksi unjuk rasa di pintu monas barat daya. Kemudian organisasi Forum Mahasiswa Orang Asli Papua yang berhasil menggelar aksi damai di depan gedung DPR-RI dengan alat peraga berupa spanduk bertuliskan “Kami Mendukung Pemekaran DOB di Tanah Papua”. Kemudian organisasi Konferensi Mahasiswa Papua (KMP) Jabodetabek menggelar aksi damai mendesak DPR RI dan pemerintah pusat untuk segera mengesahkan Daerah Otonomi Baru (DOB) serta mendukung Otoritas Khusus (Otsus) Jilid II Papua. Gerakan aksi tersebut dilaksanakan di Komplek DPR/MPR RI dan Kementerian Dalam Negeri dengan alat peraga spanduk yang bertuliskan “Papua Harus Maju”.

Selain dari kemampuan suatu organisasi dalam memobilisasi sumber dayanya, faktor yang tidak boleh luput dan juga menjadi faktor penentu keberhasilan suatu gerakan sosial terletak pada struktur negara atau tipe rezim di suatu negara. Jika negara atau rezim kuat dan represif, maka gerakan sosial akan sulit mencapai tujuannya, sehingga dalam teori mobilisasi sumber daya berpandangan bahwa keberadaan struktur

pemerintah atau tipe rezim menentukan akses kelompok terhadap sumberdaya masyarakat.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa kelas menengah dalam kebijakan pemekaran di Papua berperan dalam merumuskan isu-isu strategis yang relevan di Papua, isu-isu yang diangkat tersebut menjadi alasan serta urgensi mengapa pemekaran di tanah Papua harus dilaksanakan. Selain itu, secara praktiknya, kelas menengah berperan untuk memobilisasi sumber daya, seperti partisan yang mendukung pemekaran di wilayah Papua.

REFERENSI

- Putri, T. A., Sekarningrum, B., & Fedryansyah, M. (2022). Gerakan Sosial dan Mobilisasi Sumber Daya dalam Memperjuangkan Pengakuan Kepercayaan Berbeda. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 9(1), 22-31.
- Nurmiyati, N., & Rahmawati, D. E. (2021). POLITIK SUMBER DAYA ALAM: STUDI TERHADAP KEPENTINGAN ELIT POLITIK LOKAL DALAM PEMEKARAN WILAYAH DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. *Jurnal Wacana Politik*, 6(1).
- Utomo, S. (2017). PERAN STRATEGIS KELAS MENENGAH DALAM PILKADA. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 3(1), 243-249.
- Nurmiyati, N., & Rahmawati, D. E. (2021). POLITIK SUMBER DAYA ALAM: STUDI TERHADAP KEPENTINGAN ELIT POLITIK LOKAL DALAM PEMEKARAN

WILAYAH DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. *Jurnal Wacana Politik*, 6(1).

- Bakar, A. (2015). Disorientasi Politik dan Peran Intermediary Kelas Menengah To Pulo: Politik Lokal di Kepulauan Selayar Pasca Orde Baru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(3), 210-222.
- Suryawan, I. N. (2018). Pemekaran Daerah Dan Terbentuknya Kelas Menengah (Baru) Papua. *Jurnal Sosiologi Walisongo*, 2(2), 189-202.
- Jati, W. R. (2016, October). Peran Kelas Menengah Dalam Politik Indonesia: Sebuah Catatan Singkat. In Disampaikan pada Forum Diskusi Mahasiswa Pascasarjana FISIP UI (Vol. 8).
- Nizar, M. A. (2015). Kelas Menengah (Middle Class) dan Implikasinya bagi Perekonomian Indonesia.
- Artikel/ Berita Internet
- Nofellisa. 2022. FMP Minta Jokowi Segera Tanda Tangan UU Pemekaran Papua. <https://nasional.sindonews.com/read/821781/12/fmp-minta-jokowi-segera-tanda-tangani-uu-pemekaran-papua-1657336038> diakses 15 Desember 2024
- Rosa, N. 2022. 3 Provinsi Baru Papua Disahkan, Ini Sejarah Pemekaran Daerah di Indonesia. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6156710/3-provinsi-baru-papua-disahkan-ini-sejarah-pemekaran-daerah-di-indonesia> Diakses 15 Desember 2024
- Nurhadi Sucahyo. 2021. Pemekaran Papua: Demi Orang Asli atau Nafsu Politisi? <https://www.voaindonesia.com/a/pemekaran-papua-demi-orang-asli-atau->

nafsu-politisi-/5793740.html diakses
15 Desember 2024

jejakkasus. 2022. Konferensi Mahasiswa Papua Gelar Aksi Desak DPR RI Serta Pemerintah Sahkan DOB dan Dukung Otsus Jilid II Papua <https://jejakkasus.info/konferensi-mahasiswa-papua-gelar-aksi-desak-dpr-ri-serta-pemerintah-sahkan-dob-dan-dukung-otsus-jilid-ii-papua/> diakses 15 Desember 2024

Fauzi. 2022. Forum Mahasiswa OAP minta pemerintah sahkan DOB Papua. <https://www.antarane.ws.com/berita/2925437/forum-mahasiswa-oap-minta-pemerintah-sahkan-dob-papua> diakses 15 Desember 2024

INFO DEPOK. 2022. Mahasiswa Dan Pemuda Peduli Papua Gelar Aksi Mendukung RUU Papua Segera Disahkan. <https://www.infodepok.net/2022/06/mahasiswa-dan-pemuda-peduli-papua-gelar.html> diakses 15 Desember 2024